

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 1990, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadi, Sutrisno, 1997, *Metodologi Reseach Jilid I*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Heroepoetri, Arimbi, 2003, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- Muhamaad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni, Bandung.
- _____, 2005, *Hak Asasi Manusiain Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Panjaitan, Petrus Irwan, dan Pandapotan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Rini, Nicken Sarwo, 2016, *Perawatan Kesehatan Narapidana berbasis Hak Asasi Manusia*, Pohon Cahaya, Jakarta.

Samosir, Djisman, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta.

_____, dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subroto, R. Apik Noto, 1985, *Pidana dan Pemasyarakatan dalam Konsep Revolusi*, Jambatan, Jakarta.

Suhardjo, 1963, *Pohon Beringin Pengayoman*, Rumah Pengayoman Sukamiskin, Bandung.

Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Syaifudin, Abdul Bari, 2002, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1185/Menkes/SK/XII/2009 tentang Peningkatan Kepesertaan Jamkesmas bagi Panti Sosial, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Korban Bencana.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1259/Menkes/SK/XII/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jamkesmas bagi Masyarakat Miskin Akibat Bencana, Penghuni Panti Sosial & Penghuni Lembaga Pemasyarakatan serta Rumah Tahanan Negara.

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-693.PK.01.07.01 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi Kelompok Rentan dan Risiko Tinggi (Selain TB & HIV)

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-32.PK.01.07.01 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Dasar Perawatan Kesehatan di LAPAS, RUTAN, BAPAS, LPKA, dan LPAS.

Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 21).

Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-258.PK.01.06.01 Tahun 2017 tentang Rujukan Gawat Darurat dan Terencana bagi Narapidana, Tahanan dan Anak.

C. Artikel Jurnal

Kasim, Ifdal, 2001, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, eLSAM, Jakarta.

D. Penulisan Hukum

Albertus Pandu Adiwena, 2016, *Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana Wanita di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang*, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Emanuel Wisnu Satrio Wicaksono, 2018, *Pemenuhan Hak di Bidang Kesehatan terhadap Tahanan dan Narapidana Perempuan yang sedang Hamil di dalam Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan*, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Olivia Felycia Dagi, 2017, *Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa*, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Satria Nurul Suci, 2017, *Implementasi Pemberian Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan yang Layak bagi Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, Penulisan Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

E. Internet

Jahja, Adi Susilo, “Subyek, Responden, Informan, dan Partisipan”, <https://dosen.perbanas.id/subyek-responden-informan-dan-partisipan/>, diakses tanggal 29 September 2018.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, “Bagian Tata Usaha”, <https://lpkedungpane.com/unit-kerja/bagian-tata-usaha/>, diakses tanggal 13 Januari 2019.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, “Bidang Keamanan & Tata tertib”, <https://lpkedungpane.com/unit-kerja/bidang-keamanan-tatatertib/>, diakses tanggal 13 Januari 2019.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, “Bidang Kegiatan Kerja”, <https://lpkedungpane.com/unit-kerja/bidang-kegiatan-kerja/>, diakses tanggal 13 Januari 2019.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, “Bidang Pembinaan”, <https://lpkedungpane.com/unit-kerja/bidang-pembinaan/>, diakses tanggal 13 Januari 2019.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, “KPLP”, <https://lpkedungpane.com/unit-kerja/kplp/>, diakses tanggal 13 Januari 2019.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, “Sejarah Kependudukan di Indonesia”, <http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan/>, diakses tanggal 25 September 2018.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, “Sejarah Singkat”,
<https://lpkedungpane.com/profil/sejarah/>, diakses tanggal 13 Januari 2019.

Rumah Cemara, “Menunaikan Hak Pelayanan Kesehatan Napi dan Tahanan”,
<https://rumahcemara.or.id/menunaikan-hak-pelayanan-kesehatan-napi-dan-tahanan/>, diakses tanggal 27 September 2018.